

**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS PASCA PEMEKARAN KECAMATAN
TAHUN 2003-2011 (TINJAUAN SEJARAH PENDIDIKAN)**

JURNAL

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Sarjana
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan pada
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau



OLEH

WINDA RIZANTI
NIM. 0805120765

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2012**

**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN PINGGIR
KABUPATEN BENGKALIS PASCA PEMEKARAN KECAMATAN TAHUN
2003-2011 (TINJAUAN SEJARAH PENDIDIKAN)**

**Winda Rizanti
Tugiman
Marwoto Saiman**

Pendidikan Sejarah,FKIP-Universitas Riau
JL. Bina Widya Km 12,5 Pekanbaru
Email : rizanti-winda@yahoo.com / 085376886659

ABSTRAK

Sub Edge since 2003 has had its own government, felt the need to try to fix and carry out development to enhance human resources who have knowledge in order to implement national development in general and construction in particular baseboards. To realize this, of course, did not escape from the effort to improve the quality of education. Regional autonomy apparently played a role or influence on the development of education in the District of Uptown. This influence is seen in the number of schools, number of students, number of teachers and level of education, and infrastructure. The purpose of this study was to determine the Development of Education in District Uptown Bengkalis Year 2003-2011. The research was conducted by Historical research methods, descriptive qualitative tabulation of frequency include the data presented in the form of graphs and bar charts. The data collected by interview, documentation and literature. The results show that education in the District of Uptown Post-Expansion (2003-2011) has been progressing. In 2003 there are 59 schools and in 2011 grew to 115 schools, the number of students at each level of education also increased. Where in the beginning of the division in 2003 amounted to 18,554 people, and continued to increase until the year 2011 reached 22 984 person, the number of teachers in the early years of expansion which in 2003 amounted to 950 people and continues to rise until the year 2011 reached 1458 people. The education level of teachers is also increasing, but there are also teachers who teach high school graduates, the number of facilities and infrastructure from 2003 to 2011 also increased, but is still very limited and need to be added. So in general it can be said that the development of education in the District of Uptown has not been up there and change that still needs further efforts to increase so much better in the following years.

Key Words : Development, Education, Post Expansion

PENDAHULUAN

Dalam Undang- Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pendidikan memiliki kekuatan (pengaruh) yang dinamis dalam kehidupan manusia dimasa depan. Pendidikan dapat mengembangkan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, social dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik di mana dia hidup.

Pendidikan merupakan fenomena manusia yang sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu maka pendidikan dapat dilihat dan dijelaskan dari berbagai sudut pandang, seperti dari sudut pandang psikologi, sosiologi dan antropologi, ekonomi, politik, komunikasi dan sebagainya. Oleh sebab itu pula, definisi yang dikemukakan oleh para ahli sangat beragam.

Salah satu pengertian yang sangat umum dikemukakan oleh Dyarkara (1980:1.2) yang menyatakan bahwa pendidikan adalah upaya memanusiaakan manusia muda. Pengertian lain, dikemukakan oleh G. Thompson (1957:1.3) menyatakan bahwa pendidikan adalah pengaruh lingkungan atas individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap di dalam kebiasaan-kebiasaan, pemikiran, sikap-sikap, dan tingkah laku.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang”. Agus Taufik (2007:1.3)

Pendidikan merupakan sebuah wadah yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan penting dalam kehidupannya di masa yang akan datang baik sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat, sebagai warga Negara, bahkan sebagai warga dunia serta sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam proses pendidikan terjadi proses perkembangan. Pendidikan adalah proses membantu peserta didik agar berkembang secara optimal, yaitu berkembang setinggi mungkin, sesuai dengan potensi dan system nilai yang dianutnya dalam masyarakat. Pendidikan bukanlah proses memaksakan kehendak orang dewasa (guru) kepada peserta didik, melainkan upaya menciptakan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yaitu kondisi yang memberi kemudahan kepada anak untuk mengembangkan dirinya secara optimal. Ini berarti bahwa di dalam proses pendidikan anak aktif mengembangkan diri dan Guru aktif membantu menciptakan kemudahan untuk perkembangan yang optimal itu.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah, karena pendidikan mempengaruhi pola pikir penduduk suatu daerah. Semakin maju pendidikan berarti akan membawa berbagai pengaruh positif bagi masa depan berbagai bidang kehidupan.

Berdasarkan PP No.129 Tahun 2000 ada beberapa tujuan dibentuknya sebuah daerah baru atau dilakukannya pemekaran daerah. Tujuan tersebut diantaranya: meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan demokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, mempercepat pengelolaan potensi daerah, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meningkatkan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Dengan menjadi daerah otonom maka pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan wilayah tersebut.

Kecamatan Pinggir merupakan pemekaran dari Kecamatan Mandau, Kecamatan Pinggir diresmikan tepatnya pada tanggal 24 Oktober 2003. Sebelum Kecamatan Pinggir memiliki pemerintahan sendiri kondisi pendidikannya kurang diperhatikan oleh Kecamatan Mandau. Contohnya saja jumlah sekolahnya sangat sedikit, ini tidak seimbang dengan luas wilayah Kecamatan Pinggir. Pada saat itu sekolah yang ada di Kecamatan Pinggir hanya sekolah tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP). sekolah menengah atas hanya ada di ibu kota kecamatan saja sehingga masyarakat yang berada di desa-desa sulit untuk menjangkaunya. Pemerataan gurunya pun kurang diperhatikan oleh pemerintah Kecamatan Mandau dan saat Kecamatan Pinggir masih bergabung dengan Kecamatan Mandau alokasi anggaran yang masuk ke Pinggir sangat kecil dan luas wilayah Kecamatan Mandau sudah tidak efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian masyarakat memperjuangkan agar Pinggir menjadi Kecamatan sendiri dengan tujuan untuk mempermudah penyelenggaraan pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat, mempercepat pembangunan dan meningkatkan sumber daya manusia. Agar tujuan tersebut dapat terwujud yang paling utama yang harus dibenahi yaitu di bidang pendidikan, karena pendidikanlah yang akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di Kecamatan Pinggir.

Pemekaran Kecamatan Pinggir membuka lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur lainnya, terbentuknya otonomi daerah akan menyebabkan tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, karena semakin dekatnya pusat pemerintahan daerah dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Dalam pelayanan pendidikan sarana sekolah maupun tenaga pengajar di berbagai tingkat pendidikan akan lebih dapat teratasi.

Sesuai dengan tujuan pemekaran Penulis dapat melihat bagaimana penambahan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pinggir setelah adanya pemekaran kecamatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini telah dilaksanakan selama 4 bulan (September 2012 sampai dengan Desember 2012) terhitung sejak proposal penelitian diseminarkan dilanjutkan dengan penulisan skripsi sampai dengan ujian sarjana.

Jenis penelitian adalah metode historis. Metode Historis merupakan penelaahan dari buku-buku, arsip-arsip dan dokumen serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau yang dilaksanakan secara sistematis. Karena dengan menggunakan metode sejarah gambaran masa lampau itu akan dapat diuraikan secara sistematis dan objektif sehingga kebenaran suatu penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata. Yang bertujuan untuk mengetahui berapa jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru serta sarana dan prasarana yang ada di Kecamatan Pinggir Pasca pemekaran tahun 2003-2011.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 1). Teknik Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pernyataan-pernyataan pada para responden. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai: a).Kepala Bagian Bendaharawan Kecamatan Pinggir dan 2).Kepala Bagian Administrasi UPTD Pendidikan Kecamatan Pinggir.2).Teknik Dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui dokumen-dokumen, arsip,dan lainnya yang diperoleh dari pemerintahan Kecamatan Pinggir dan Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir.3).Teknik Kepustakaan.Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi yang dapat digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari berbagai buku-buku dan karya tulis lainnya yang relevan dengan peristiwa yang diteliti.

Data tentang pembentukan Kecamatan Pinggir akan diolah dan disajikan secara deskriptif kualitatif sesuai kronologi kejadian. Data tentang perkembangan jumlah sekolah, jumlah guru, jumlah siswa, sarana dan prasarana pada setiap jenjang pendidikan akan ditabulasikan dengan tabulasi frekuensi yang diolah dari data Dinas Pendidikan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.

Dalam pengolahan data, penulis menggunakan dua rumus, yang pertama yaitu :Rumus Persentase Pertumbuhan dan Rumus Rata-Rata Ukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data tentang Perkembangan Pendidikan di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Pasca Pemekaran Tahun 2003-2011. Yang dimaksud perkembangan disini adalah perkembangan jumlah sekolah, jumlah siswa, jumlah guru dan sarana dan prasarana sekolah.

Pemberlakuan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan

PERDA Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Siak Kecil dan Kecamatan Pinggir. Dengan terbentuknya kecamatan pinggir diharapkan pembangunan wilayahnya menjadi lebih baik dari sebelumnya, termasuk pula dalam pengelolaan dan pengembangan dalam bidang pendidikan. Pemberlakuan Undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik kepada yang bersifat desentralistik. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan sektor pendidikan disemua jenjang pendidikan(TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK).

Pemberlakuan Otonomi Daerah memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada pengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetensi, kebijakan otonomi daerah berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Pemerintah pusat tidak diperkenankan lagi mencampuri urusan pendidikan daerah. Pemerintah pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan yang bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan pendidikan, namun pelaksanaannya diserahkan atau dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Pinggir, kondisi pendidikan di Kecamatan Pinggir mengalami kemajuan, berpotensi dan mampu membangun daerah Kecamatan Pinggir serta mampu bersaing. Perkembangan pendidikan di Kecamatan Pinggir semenjak terbentuknya kecamatan sendiri banyak mengalami perubahan dan perkembangan, diantaranya: dimana otonomi sudah berjalan seperti yang diharapkan. Pemerintah Kecamatan Pinggir memiliki hak dan wewenang untuk mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk dalam bidang pendidikan. Dapat dikatakan bahwa sekolah sebagai sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Pinggir, secara keseluruhannya telah mengalami peningkatan jika dibandingkan saat Pinggir masih bergabung dengan Kecamatan Mandau. Hal ini dapat dilihat dengan peningkatan pembangunan sekolah dari tahun 2003 hingga Tahun 2011 pada jenjang TK/RA, SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA, dan SMK.

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah memaparkan secara panjang lebar mengenai analisis hasil penelitian yang berjudul "Perkembangan Pendidikan di Kecamatan Pinggir Pasca Pemekaran Kecamatan Tahun 2003-2011 (Tinjauan Sejarah Pendidikan)", maka penulis menyusun kesimpulan bahwa jumlah sekolah pada umumnya bertambah tetapi tidak terjadi pada setiap tahunnya. Hanya 2 atau 3 tahun berikutnya setelah terjadi pemekaran kecamatan. Pada tahun 2003 ada 59 sekolah dan pada tahun 2011 bertambah menjadi 115 sekolah, jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan juga mengalami peningkatan. Dimana pada awal tahun pemekaran yaitu pada tahun 2003 berjumlah 18.554 orang dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 22.984 orang, jumlah guru pada awal tahun pemekaran yaitu pada tahun 2003 berjumlah 950 orang dan terus meningkat hingga pada tahun 2011 mencapai 1458 orang. Tingkat pendidikan guru juga semakin meningkat, namun masih ada juga guru yang mengajar dengan tamatan SMA dan yang paling menyedihkan ada juga

beberapa sekolah yang masih mau menerima sebagai guru yang cuma tamatan SMA. jumlah sarana dan prasarana dari tahun 2003 sampai tahun 2011 juga mengalami peningkatan, namun masih sangat terbatas dan perlu penambahan seperti penambahan Ruang Kelas, Pustaka, Lab. IPA, dan Lab. Komputer, perkembangan pendidikan yang terjadi di Kecamatan Pinggir juga dipengaruhi oleh adanya Otonomi Daerah, baik dari segi jumlah sekolah, jumlah guru serta sarana dan prasarana sekolah. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa perkembangan pendidikan di Kecamatan Pinggir telah terdapat perubahan dan belum maksimal sehingga masih perlu usaha peningkatan lebih lanjut agar lebih baik lagi pada tahun-tahun berikutnya.

Adapun saran-saran yang ingin penulis kemukakan yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kecamatan Pinggir harus lebih ditingkatkan lagi agar menjadi lebih baik. Begitu juga dengan prestasi yang telah dicapai agar dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan dan pembangunan sarana dan prasarana seperti pembangunan fisik sekolah sebagai pendukung proses belajar mengajar agar lebih ditingkatkan dan ditambah lagi. Karena jumlah murid yang terus meningkat harus diimbangi dengan penambahan ruang kelas. Dan suasana sekolah yang nyaman dapat memotivasi minat belajar siswa dan turut mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak hanya diberikan kepada guru, tetapi diperlukan kerjasama berbagai pihak yaitu para pelaku pendidikan, pemerintah dan juga masyarakat dan pemerintah Kecamatan Pinggir diharapkan dapat memperluas lapangan kerja sesuai dengan produk pendidikan yang telah dihasilkan, sehingga mampu mewujudkan keterkaitan antara produk pendidikan yang telah dihasilkan tersebut dengan tenaga kerja yang dibutuhkan. Pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakatnya, agar masyarakat mampu menunjang kegiatan pendidikan. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah harus terus berusaha meningkatkan bidang pendidikan agar pembangunan di kecamatan pinggir dapat dilaksanakan dengan baik sehingga pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kecamatan Pinggir.

DAFTAR PUSTAKA

- Baheram. Murni. 2009. *Pengantar Pendidikan*. Pekanbaru. Cendikia Insani
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis. 2011. Kecamatan Pinggir dalam Angka. Bengkalis. Published
- Bratakusumah. Deddy Supriady, Solihin. Dadang. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jakarta. PT Gramedia Pustaka
- Ihsan. Fuad. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Jalal, Fasli. Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa
- J. Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta. PT Rineka Cipta
- Kansil, Christian S.T. 2001. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika
- Muzakir, Arif. 2006. *RPUL Global*. Semarang. Aneka Ilmu
- Mikarsa. Hera Lestari, Taufik Agus, Prianto. Puji Lestari. 2007. *Pendidikan Anak di SD*. Jakarta. Universitas Terbuka
- Muzakir, Arif. 2006. *RPUL Global*. Semarang. Aneka Ilmu

- Purwanto, Ngalim. 2007. Ilmu Pendidikan Teoretis dan Praktis. Bandung. PT Remaja Rusdakarya
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000
- Sudjana. 2005. Metoda Statistika. Bandung. Tarsito
- Sahertian, Piet A. 1994. Dimensi-dimensi Administrasi Pendidikan di Sekolah. Surabaya. Usaha Nasional
- Tim Suara Pembaharuan. 2002. *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*. Jakarta. Penebar Swadaya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
- Widjaja, HAW. 2002. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Widjaja, HAW. 2002. Pemerintahan Desa/Marga. Jakarta. Raja Grafindo Persada